

Analisis Kebijakan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Menengah

Candra Swandi¹, Aiman Abu Khair², Rezki Siti Hajar³, Nurfadillah⁴, Abdul Azis Muslimin⁵

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

E-mail : candraswandi756@gmail.com¹, aimanrazaq023@gmail.com², rezkisitihajar16@gmail.com³,
nurfadillahhariandani26@gmail.com⁴, abdazizm@uin-alauddin.ac.id⁵

Article History:

Received: 06 Juli 2025

Revised: 01 September 2025

Accepted: 18 September 2025

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Implementasi, Tantangan, Solusi

Abstrak: Pendidikan dasar dan menengah merupakan pilar utama dalam sistem pendidikan nasional yang berperan penting dalam membentuk karakter, keterampilan dasar, serta kesiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP/SMA) di Indonesia, dengan fokus pada implementasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta tantangan dan solusi yang muncul dalam proses tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur terhadap berbagai sumber akademik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan yang jelas, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan, serta dukungan lingkungan sosial dan geografis. Tantangan utama meliputi kesenjangan mutu antarwilayah, rendahnya kualitas guru, keterbatasan sarana teknologi, serta perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Diperlukan kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan kontekstual agar pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan dasar dan menengah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kecakapan dasar, serta kesiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Namun, pelaksanaan kebijakan pendidikan di kedua jenjang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan mutu antarwilayah, kurangnya kapasitas pendidik, serta perubahan kebijakan yang sering kali tidak konsisten.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada regulasi semata, tetapi juga pada kesiapan sistem dan pelibatan semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mampu menganalisis secara kritis bagaimana kebijakan pendidikan dasar dan menengah diterapkan di lapangan, apa saja faktor penghambatnya, serta strategi yang dapat digunakan untuk memperbaikinya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dengan fokus pada tantangan dan solusi yang dapat diterapkan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengambil kebijakan, praktisi pendidikan, dan akademisi dalam merumuskan strategi pengelolaan pendidikan yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dirancang untuk mengarahkan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan nasional. Menurut Grindle (1980), kebijakan tidak hanya dinilai dari perumusannya, tetapi terutama dari implementasinya di lapangan, yang melibatkan aktor, lembaga, serta kondisi sosial dan politik yang menyertainya. Dalam konteks pendidikan, kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan dinamika lokal maupun nasional.

Implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel penting, yakni: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mendukung. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang baik harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, seperti guru dan kepala sekolah, serta ketersediaan sarana pendukung yang memadai.

Pendidikan dasar dan menengah merupakan jenjang pendidikan yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar peserta didik. Tilaar (2009) menegaskan bahwa pendidikan pada jenjang ini harus berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya, tidak hanya mencerdaskan secara intelektual tetapi juga memperkuat aspek moral dan sosial. Oleh sebab itu, kebijakan yang diterapkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu mempertimbangkan aspek kurikulum, manajemen pendidikan, serta partisipasi masyarakat secara aktif.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, tata kelola lembaga pendidikan, serta dukungan lingkungan eksternal. Mulyasa (2013) menyatakan bahwa manajemen pendidikan yang efektif ditandai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara profesional dan kolaboratif. Konteks sosial-geografis seperti kondisi daerah terpencil atau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan, karena berdampak langsung pada ketersediaan guru, infrastruktur, serta akses peserta didik terhadap layanan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam tentang Analisis Kebijakan Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Menengah dengan menggunakan literatur yang relevan sebagai sumber data, dan menghasilkan data berupa kata-kata atau deskripsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan sesuai dengan topik penelitian. Kemudian data tersebut dikumpulkan melalui sumber bacaan berupa buku dan juga artikel ilmiah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan cara mengidentivikasi, mengkaji, dan menyimpulkan informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber bacaan untuk mendapatkan pemahaman tentang Analisis Kebijakan Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Menengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, baik dari sisi regulasi maupun pendekatan implementasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum utama dalam mengatur jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar, yang meliputi SD dan SMP, serta pendidikan menengah, yang mencakup SMA dan SMK, diposisikan sebagai tahap penting dalam pembentukan karakter, keterampilan dasar, dan kesiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Namun, pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pemerataan mutu, infrastruktur, dan kompetensi sumber daya manusia.

Implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, kualitas desain kebijakan menjadi penentu sejauh mana kebijakan dapat diadopsi secara efektif di sekolah. Kebijakan yang tidak disertai dengan panduan teknis yang jelas cenderung menimbulkan multitafsir dan kesulitan dalam pelaksanaannya, sebagaimana terlihat pada implementasi Kurikulum 2013. Kedua, kapasitas sumber daya manusia, terutama guru dan kepala sekolah, menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Banyak guru di jenjang SD dan SMP/SMA masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang dituntut oleh kebijakan baru, terutama jika pelatihan tidak berkelanjutan dan kurang kontekstual.

Ketiga, ketersediaan infrastruktur dan pendanaan menjadi variabel yang sangat memengaruhi efektivitas kebijakan. Di banyak daerah 3T, sekolah masih kekurangan fasilitas dasar seperti perpustakaan, laboratorium, dan koneksi internet. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas pembelajaran, terutama di era digital saat ini. Keempat, dukungan ekosistem pendidikan seperti peran orang tua, komite sekolah, dan dinas pendidikan juga sangat menentukan. Sekolah dengan budaya kolaborasi yang baik cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kelima, konteks sosial dan geografis turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Sekolah di daerah terpencil mengalami hambatan transportasi, keterbatasan tenaga pengajar, serta akses teknologi yang sangat minim. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pendidikan yang seragam tidak selalu dapat diterapkan secara adil dan efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal sangat diperlukan agar kebijakan benar-benar menyentuh akar permasalahan pendidikan di lapangan.

ketimpangan akses dan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil menjadi isu krusial yang terus berulang dalam setiap kajian kebijakan pendidikan nasional. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki infrastruktur yang memadai, guru dengan kualifikasi tinggi, serta akses terhadap sumber belajar digital yang luas. Sebaliknya, sekolah di wilayah tertinggal seringkali mengalami kekurangan guru, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya dukungan teknologi. Ketimpangan ini berdampak langsung pada hasil belajar siswa,

sebagaimana tercermin dalam survei nasional dan internasional seperti Asesmen Nasional dan PISA (Programme for International Student Assessment).

transformasi digital dalam dunia pendidikan masih menghadapi hambatan serius, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program digitalisasi sekolah, seperti penyediaan perangkat TIK dan pelatihan guru, kenyataannya adopsi teknologi belum merata. Rendahnya literasi digital guru, minimnya pelatihan berbasis praktik, serta ketiadaan akses internet di sejumlah daerah menjadi penghalang utama. Tantangan ini semakin terasa saat pandemi COVID-19, di mana pembelajaran daring tidak dapat diakses secara optimal oleh seluruh siswa di Indonesia, khususnya dari keluarga prasejahtera.

Faktor lain yang perlu dicermati adalah ketidakkonsistenan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan di sektor pendidikan. Kebijakan yang sering berubah, terutama dalam hal kurikulum dan asesmen, menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah. Hal ini menyebabkan proses adaptasi yang berulang dan memakan waktu, serta membebani guru dan kepala sekolah yang menjadi ujung tombak pelaksana kebijakan. Ketidadaan mekanisme evaluasi dan monitoring berkelanjutan juga menyebabkan banyak kebijakan tidak dapat diukur keberhasilannya secara sistemik.

pengelolaan pendidikan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal terbukti mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Sekolah-sekolah yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah dalam perencanaan serta evaluasi pendidikan, cenderung lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan. Pendekatan kolaboratif ini juga memungkinkan terjadinya inovasi lokal, misalnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal atau program pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan karakteristik siswa.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum dan arah kebijakan pendidikan di Indonesia sudah cukup kuat, namun tantangan implementasi masih sangat besar. Diperlukan kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kondisi riil di sekolah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan, penyediaan sarana-prasarana pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi prasyarat utama untuk menciptakan pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, kompetensi dasar, dan kesiapan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan serta dunia kerja. Meskipun telah terdapat dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor seperti desain kebijakan yang kurang fleksibel, rendahnya kompetensi guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketimpangan geografis menjadi tantangan utama dalam penerapan kebijakan pendidikan secara efektif dan merata.

Perubahan kebijakan yang tidak konsisten serta minimnya partisipasi pemangku kepentingan lokal dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan turut memperburuk situasi. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan pendekatan kolaboratif dan kontekstual cenderung mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada perumusannya, tetapi juga pada kemampuan sistem pendidikan dalam mengimplementasikannya secara adaptif.

Pemerintah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan yang berbasis data, kontekstual, dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- Hadi, S. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002.
- Jalal, Fasli, dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Kemendikbud. *Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, 2019.
- Kemendikbudristek. *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.
- Mulyasa, E. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- OECD. *Education Policy Implementation: A Literature Review*. Paris: OECD Publishing, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.
- Suryadi, A. *Pendidikan di Era Digital: Transformasi dan Tantangannya*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Tilaar, H.A.R. *Kebijakan Pendidikan: Perkembangan Pendidikan Nasional dari Masa ke Masa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Unicef. *Learning Loss and Digital Divide During Covid-19*. New York: Unicef Office of Research, 2021.
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488.
- Wahyono, H., dkk. "Kompetensi Guru dalam Implementasi Pembelajaran Tematik di SD." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 26, no. 1 (2020): 45–55.
- World Bank. *Indonesia Education Spending Assessment*. Washington, DC: World Bank Group, 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.